

Pertumbuhan dan Pemerataan Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional

Syachrinuddin SEMAN

PENDAHULUAN

Pertumbuhan serta pemerataan merupakan dua hal yang cukup penting dalam kerangka membentuk suatu Ketahanan Nasional (National Resilience) di Indonesia. Tanpa ada pertumbuhan sebagai suatu proses pembangunan dan pemerataan pendapatan sebagai upaya mensejahterakan penduduk secara adil maka ketahanan nasional hanyalah suatu hal yang ideal.

Dalam hubungan inilah dalam membentuk suatu ketahanan nasional di butuhkan adanya kondisi dinamis yang merupakan hasil integritas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan oleh pemerintah baik dalam perekonomian, sosial, politik maupun budaya.

Bentuk dari ketahanan nasional berupa pencerminan dari kualitas manusia Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia secara merata. Indikator langsung untuk ukuran ketahanan nasional terdapat pada angka kematian bayi, harapan hidup, pendapatan per kapita, tingkat baca huruf, tingkat konsumsi protein, tingkat konsumsi karbohidrat, jumlah dokter per 1.000 jumlah penduduk usia anak sekolah dan lain-lain.

Jadi pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah gambaran dari aktivitas penduduk dalam setahun dari berbagai sektor/lapangan pekerjaan biasanya dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan dicatat secara kontinu. Dari Produk Domestik Bruto ini dapat dihitung pendapatan per kapita sebagai hasil bagi antara Produk Domestik Bruto dengan jumlah penduduk.

Di lain pihak pemerataan adalah upaya dari pemerintah dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh sehingga tercipta pembagian pendapatan yang merata dan sekaligus terkait usaha perluasan kesempatan kerja, pemilikan dan penggunaan tanah, perumahan, perluasan fasilitas dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan gizi, hukum dan ketertiban masyarakat, lingkungan hidup dan lain-lain.

Sampai seberapa besar pertumbuhan dan pemerataan yang sudah terlaksana sampai saat ini, terutama di daerah-daerah perlu ditelaah. Tanpa mengetahui peluang-peluang kekurangan dalam pertumbuhan maupun pemerataan, sulit untuk dikatakan bahwa ketahanan nasional yang ada sekarang di anggap baik.

Tulisan ini mencoba mengamati pertumbuhan dan pemerataan secara umum antar daerah propinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui daerah-daerah mana yang sangat perlu diperhatikan maupun yang cukup diperhatikan. Di samping itu dengan adanya pertumbuhan yang merata dan pemerataan pendapatan yang hampir seimbang antar daerah, maka dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional di setiap propinsi akan menjadi efektif dan efisien.

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Pertumbuhan dan pemerataan di sekitar tahun 1970-an pernah menjadi kondisi yang dipertentangkan. Bahkan di Indonesia pernah diterima faham bahwa upaya pembangunan yang terlalu ditujukan pada pertumbuhan (growth) akan menimbulkan kemerosotan dalam pemerataan. Akibatnya di saat proses pembangunan ekonomi berjalan masalah keadilan menjadi terlantar dan menimbulkan gejolak politik dan sosial. Ternyata pertentangan ini hanyalah terjadi pada situasi dan kondisi tertentu.

Leipzeiger dan Lewis (1980) dalam studinya mengatakan bahwa kebijaksanaan pemerataan (redistributive policies) merupakan bagian yang ampuh guna mencapai kesejahteraan sosial ekonomi pada negara yang termasuk dalam kondisi "middle income group" (PDB per kapita US\$550 lebih), sedangkan negara yang termasuk "low income group" kesejahteraan dapat diperbaiki lewat pertumbuhan (growth) bukan pemerataan (redistribution).

Malahan hasil studi Chenery (1980) menganjurkan agar bagi negara-negara yang mempersiapkan diri untuk membentuk struktur ekonomi yang mampu mendukung upaya pemerataan di awal gerakan menuju posisi "middle income" tampak berhasil mencapai status yang menggembirakan di mana pertumbuhan dan pemerataan berjalan bersama. Ditambahkannya akibat

kebijaksanaan pemerataan tersebut terciptanya pertumbuhan yang cepat sehingga membantu masuknya negara-negara berkembang pada tahapan lepas landas.

Oleh sebab itu Hick (1979) memperingatkan kepada negara-negara yang terlalu rajin mengejar pertumbuhan selanjutnya mengabaikan proses ke arah pemerataan di saat memasuki tahapan pada "middle income" ternyata mengalami kesulitan di dalam meningkatkan pembangunan ekonominya.

Pertumbuhan Perekonomian

Berdasarkan rata-rata nasional pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup menggembirakan di mana sejak tahun 1976-1980 rata-rata di atas 6%. Setelah tahun 1982 dengan kejayaan minyak berakhir dan timbulnya resesi pertumbuhan mengalami penurunan yang diperkirakan sekitar 4-5% per tahun.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi per daerah sejak tahun 1976-1980 tampak perbedaan yang cukup berarti. Pada beberapa daerah yakni Aceh, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, rata-rata di atas 14%. Hanya daerah D.I. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat yang rendah, masing-masing pertumbuhan ekonominya sekitar 6,13% dan 7,13% (lihat Lampiran 1).

Indikator yang terpenting untuk melihat pertumbuhan adalah PDB per kapita. PDB per kapita antar daerah menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi. Di tahun 1970 disparitas PDB per kapita antara daerah Nusa Tenggara Barat dan daerah Kalimantan Timur adalah sembilan kali lipat (Hendra Esmara, 1973).

Dalam masa 10 tahun yakni sampai tahun 1980 perbedaan PDB per kapita ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pada tahun 1980 PDB per kapita yang terendah tetap daerah Nusa Tenggara Barat yakni Rp 108.000,00 per kapita setahun. Sedangkan daerah Kalimantan Timur merupakan daerah yang tertinggi PDB per kapita yakni sebesar Rp 846.000,00. Disparitas PDB per kapita hanya menjadi, kurang lebih delapan setengah kali lipat.

Akibat disparitas ini jelas membawa kepincangan dalam persiapan lepas landas mendatang. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius terutama pada daerah-daerah yang PDB per kapitanya di bawah US\$300 per tahun. seperti daerah Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya.

Untuk daerah ini dibutuhkan investasi pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dengan cepat di samping pelaksanaan transmigrasi untuk daerah-daerah yang daya dukung lahannya (carrying capacity) sudah sangat terbatas.

Pemerataan

Pemerataan adalah salah satu dari upaya pembangunan yang oleh Todaro (1977) dikatakan bahwa pembangunan merupakan pencapaian jaminan akan masa depan yang baik (life sustenance), jaminan akan kebebasan (freedom) dan peningkatan harga diri (self esteem).

Dalam usaha mencapai hal tersebut maka berbagai teori dikembangkan terutama untuk pemerataan sebagai cara yang terpenting dalam pembangunan antara lain:

- a. Sistem "employment generation" yang mengutamakan pembukaan lapangan kerja baru terutama pada sektor informal baik bagi penduduk pedesaan maupun bagi penduduk kota. Oleh ILO ditekankan pada bantuan modal untuk golongan ekonomi lemah yang tak mempunyai modal namun cukup berpotensi.
- b. Chenery (1980) lewat Bank Dunia menyarankan agar pemberian modal pada golongan ekonomi lemah dengan cara mengubah kebijaksanaan pada penanaman modal dalam proyek besar yang tersentralisasi pada investasi secara langsung atau tidak langsung untuk masyarakat melalui peningkatan kredit kecil, modal kerja, peningkatan pendidikan dan ketrampilan maupun kesehatan sebagai prakondisi lepas landas pembangunan.
- c. Anjuran dari James Grant, Mahbul ul Haq maupun Hick (Overseas Development Council dan Bank Dunia) yang bertujuan bahwa dalam pertumbuhan dibutuhkan adanya suatu pendekatan pada pendidikan yang serasi dengan keinginan pembangunan, pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, fasilitas dasar seperti pangan, air bersih/sehat, papan, sandang serta partisipasi dalam pengambilan keputusan jika menyangkut dirinya atau warga mereka (basic needs).
- d. Bagi negara agraris seperti Indonesia maka John Mellor melihat unsur pemerataan adalah dari sudut pemilikan tanah. Dengan usaha ini produksi pertanian dapat ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan pendapatan. Di samping itu perlu dikembangkan ketrampilan bagi petani, dibutuhkan perbaikan teknologi produksi, Balai Informasi Pertanian dan lain-lain. Peningkatan ini jelas dikaitkan dengan peternakan, perikanan maupun perke-

bunan. Selanjutnya secara integratif dikembangkan pula industri agribisnis yang padat karya sebagai infrastruktur di masa datang.

- e. Mengembangkan sumber-sumber manusia yang merupakan subjek manusiawi baik kemampuan fisik maupun non-fisik. Pemecahannya adalah redistribusi asset/kekayaan produksi seperti yang dilakukan oleh negara Jepang, Singapura, Taiwan dan Korea. Selanjutnya diarahkan pada industrialisasi, demikian konsep Irma Adelman dari hasil penelitiannya pada keempat negara di atas. Sebab dengan industri pengerahan tenaga kerja relatif banyak (industri tekstil) sekaligus pendapatan menjadi lebih besar akibatnya pemerataan cepat terlaksana.
- f. Albert Waterson dari ILO menyarankan perlunya integrasi pembangunan di daerah pedesaan. Dikatakannya bahwa proses pembangunan dari atas kebanyakan tidak berhasil dalam rangka meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat kelompok miskin. Ditambahkannya bahwa fokus pada bidang pertanian mengakibatkan kesenjangan antara petani miskin menjadi petani gurem/buruh tani. Sedangkan petani yang banyak mempunyai tanah akan bertambah kaya. Karenanya ia berpendapat bahwa revolusi penghijauan justru mengakibatkan perluasan kesenjangan di sektor tenaga kerja dan pendapatan petani. Untuk itu dibutuhkan bantuan sosial bagi masyarakat pedesaan yang mana menyangkut masalah "kesejahteraan mental" yakni redistribusi tanah (landreform) dan padat karya pada saat selepas panen dalam hubungannya peningkatan infrastruktur pedesaan seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, industri rumah tangga dengan bahan setempat, sehingga dengan cara tersebut dapat dibina mental masyarakat dalam pengembangan wilayah sendiri secara bertanggung jawab. Pada akhirnya dapat diatasi kesenjangan antara kota dan desa.
- g. Membangun tata internasional ekonomi baru dalam kerangka memecahkan kemiskinan di Dunia Ketiga. Tatanan tersebut belum mencapai jalan keluar yang tegas, malah proteksi demi proteksi di tiap negara bertambah. Walaupun sudah adanya kerjasama wiraswasta-wiraswasta negara maju dan negara berkembang namun kondisi tersebut belum berarti apa-apa.

Ketujuh model di atas merupakan hasil pengamatan Weaver, namun dari keseluruhan teori yang diambil dari sana-sini masih belum menyentuh secara mendasar kepada permasalahan yang sebenarnya. Oleh Weaver (1978) dikatakannya teori tersebut masih makro dan perlu dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan yang sungguh.

Di Indonesia masalah pemerataan sudah dilaksanakan sejak Pelita III dan penjonolan masalah pemerataan merupakan perkembangan dari harapan rakyat untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

Penjabaran pemerataan dalam bentuk delapan jalur pemerataan yang berlandaskan pada trilogi pembangunan di mana pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam asas pemerataan pembangunan sesuai dengan pola Garis-garis Besar Haluan Negara maka langkah dan kegiatan pemerataan mencakup: Pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembangunan pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan Kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Namun sampai sejauh masa asas pemerataan telah berjalan maka beberapa bagian dari hasil pembangunan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Hal tersebut ditunjukkan dari perbandingan antar daerah propinsi di Indonesia. Sedangkan kaitannya dengan ketahanan nasional dapat dilihat dari uraian pada bab berikut ini.

KETAHANAN NASIONAL, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Ketahanan Nasional

Dalam GBHN (1983) ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian ketahanan nasional tidak sama dengan kekuatan militer tetapi berhubungan erat dengan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

Dari lima aspek ketahanan nasional yakni ideologi nasional, stabilitas politik, pembangunan ekonomi yang adil dan merata, sosial budaya serta pertahanan keamanan, maka Trilogi Pembangunan merupakan tumpuan yang harus dilaksanakan.

Jelasnya ketahanan nasional adalah tingkat keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan

yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dalam kelangsungan cita-citanya.

Dalam ketahanan nasional terkait bidang ekonomi yakni pertumbuhan yang adil dan merata.

Ketahanan bidang ekonomi ini merupakan mata rantai yang paling lemah dalam rangkaian ketahanan nasional di Indonesia (Lemhanas, 1982). Akibat dari bidang ekonomi yang lemah akan tercermin pada kualitas manusianya.

Salah satu dari cara pengukuran kualitas manusia adalah dilihat dari peningkatan indeks kualitas hidup. Oleh Grant (1978) angka kualitas hidup yang cukup baik apabila:

1. Angka kematian bayi di bawah umur 1 tahun adalah 50/1.000 kelahiran;
2. Angka harapan hidup (life expectancy) 70 tahun;
3. Kemampuan baca dan tulis bagi penduduk 10 tahun ke atas adalah 75%;
4. Angka Fertilitas Total 25 per 1.000 penduduk.

Dari 4 indikator di atas akan dibahas 3 indikator mencakup angka kematian bayi, harapan hidup, dan kemampuan baca/tulis.

Angka kematian bayi bila dilihat per daerah (lihat Lampiran 1), ternyata sangat berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Apabila disusun angka kematian bayi dari yang tertinggi sampai yang terendah maka daerah Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang tertinggi angka kematian bayinya (187) dan DI Yogyakarta yang terendah (62).

Jika data angka kematian bayi dibagi atas tiga kelompok, yakni tinggi (lebih besar dari 120), sedang (90-120) dan rendah (lebih kecil dari 90), maka ada 7 daerah yang termasuk kategori tinggi, yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Untuk kategori sedang ada 15 daerah propinsi dan sisanya termasuk kategori rendah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali dan DI Yogyakarta. Untuk harapan hidup karena mengikuti pola angka kematian bayi maka bertambah rendahnya kematian bayi akan mengakibatkan tingginya harapan hidup, demikian juga sebaliknya.

Untuk tingkat baca tulis secara nasional persentase cukup dinilai tinggi, karena sampai tahun 1980 sudah mencapai kurang lebih 70%. Hanya pada propinsi tertentu tingkat baca tulis yang dibawah 70% yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan beberapa propinsi lainnya.

Dengan tingkat indikator kualitas hidup per daerah bila dikaitkan dengan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita dapat dijabarkan pada Skema di bawah ini.

Skema 1

RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA TAHUN 1976-1980 DAN HUBUNGANNYA PDB PER KAPITA DAERAH PROPINSI SE-INDONESIA TAHUN 1980.

		Tinggi	Rendah
Tingkat PDB Per Kapita Tahun 1980	T I N G G I	<i>Daerah Maju</i> - Kalimantan - DKI Jakarta - Aceh - Sumatera Utara - Kalimantan Tengah - Sumatera Selatan > \$300	<i>Daerah Berpotensi Rendah</i> Jawa Timur
	R E N D A H	<i>Daerah Berkembang</i> - Bengkulu - Bali - Kalimantan Barat - Kalimantan Selatan - Sulawesi Utara	<i>Daerah Kurang Berkembang</i> - Nusa Tenggara Barat - Jawa Barat - DI Yogyakarta - Jawa Tengah - Sulawesi Tengah - Maluku

Sumber: Diolah dari Lampiran 1.

Dengan Skema 1, maka daerah maju (prosperous area) seperti Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan lainnya, pertumbuhan perlu dipertahankan pada posisi yang tinggi agar tidak merosot ke kanan menjadi daerah yang berpotensi rendah. Sedangkan untuk Jawa Timur perlu upaya terpadu dalam pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak ke arah posisi yang tinggi dengan meningkatkan rata-rata tingkat pertumbuhan.

Bagi daerah yang berkembang seperti Propinsi Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat dan lainnya, mengusahakan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga dalam jangka waktu tidak terlalu lama dapat pindah pada posisi daerah maju.

Untuk daerah-daerah yang kurang berkembang yang mencakup daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Maluku perlu diupayakan pembangunan yang tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan investasi pembangunan yang lebih besar atau usaha mengurangi tekanan penduduk terutama untuk daerah Jawa

Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Khusus untuk daerah yang kurang berkembang terutama daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah harus diprioritaskan mengingat kualitas hidup penduduk sangat rendah tercermin dari PDB per kapita yang rendah (kurang dari Rp 175.000,00 setahun), angka kematian bayi yang tinggi dan harapan hidup yang rendah.

Diharapkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh terutama para perencana daerah maupun Bappenas, keenam daerah yang dinilai kurang berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan maupun pendapatan per kapita sehingga dapat menuju daerah yang berkembang.

Guna mengukur sampai seberapa jauh pemerataan dilaksanakan di tiap propinsi dapat dilihat pada hasil perhitungan Gini Indeks untuk tahun 1979 oleh Syahrudin (Lampiran 1 kolom 3).

Pada tabel tersebut tercatat bahwa Gini Indeks di atas angka 0,3 ada 10 daerah propinsi yang mencakup Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Daerah ini menunjukkan ketimpangan dalam tingkat pendapatan. Keadaan ini perlu dibenahi dengan upaya pemenuhan "basic needs" bagi masyarakat bawah dan pelaksanaannya perlu diamati dengan cermat sesuai dengan petunjuk delapan jalur pemerataan.

Dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pada daerah yang kurang berkembang dan daerah yang kepincangan tinggi, merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan penduduk yang mampu berpartisipasi aktif dalam ketahanan nasional. Sebab ketahanan nasional yang mapan akan memacu kembali pertumbuhan maupun pemerataan dalam bidang ekonomi.

Dari sudut lain, penduduk yang sehat, harapan hidup yang tinggi, pendapatan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi akan berarti kualitas penduduk menjadi tinggi, dan ini merupakan modal yang besar dalam pertahanan.

Di samping itu kualitas penduduk yang tinggi merupakan landasan yang kuat dalam perekonomian di masa damai sekaligus sebagai basis mobilitas rakyat dalam pertahanan semesta di masa perang.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan pertumbuhan pada daerah/propinsi yang kurang berkembang, maka keinginan untuk menekan serendah mungkin angka kematian bayi, menaikkan harapan hidup serta meningkatkan pendapatan, perlu dilaksanakan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah daerah maupun bimbingan dan pengawasan dari pusat.

Untuk pemerataan, seyogyanya dilaksanakan pada daerah-daerah yang angka Gini Indeksnya masih tinggi.

KESIMPULAN

Sesungguhnya pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang cukup penting dalam kaitannya dengan ketahanan nasional sebagai pencerminan kualitas manusia Indonesia.

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan hal yang saling menunjang bila didasarkan pada kebijaksanaan pemerataan di saat kondisi negara mencapai posisi "middle income" (yang oleh Bank Dunia dinyatakan dengan pendapatan per kapita sebesar US\$550 atau lebih kurang Rp550.000,00 per kapita per tahun).

Tampaknya disparitas pendapatan antar daerah yakni daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur tidak terlalu jauh berbeda selama 10 tahun terakhir sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 yakni tetap berkisar dari 9 menjadi 8,5 kali lipat. Kondisi ini tetap tidak berubah di mana Nusa Tenggara Barat tetap merupakan daerah yang paling rendah PDB per kapitanya dan Kalimantan Timur merupakan daerah yang PDB per kapitanya tertinggi.

Dalam pemerataan, maka pengamatan Weaver dari berbagai teori pencegah kepincangan pendapatan belum menyentuh secara menyeluruh kepada permasalahan maka delapan jalur pemerataan merupakan cakupan pelaksanaan yang terbaik dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Ketahanan nasional merupakan hakikat dari kemampuan dan ketangguhan bangsa sebagai kondisi yang dinamis dan integratif atas aspek kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, baik harapan hidupnya, pendapatan per kapita dan tingkat kematian yang rendah. Namun dari berbagai daerah maka daerah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang kurang berkembang baik karena pendapatan yang rendah maupun daya dukung lahan yang melebihi kapasitas.

Dari sudut pemerataan ada 10 daerah yang masih pincang, karenanya dibutuhkan pembenahan yang terpadu terutama dalam hal "kebutuhan dasar" bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan sekaligus pemerataan diharapkan ketahanan nasional akan bertambah mapan dan merupakan dasar yang akan memproses kembali pertumbuhan dan pemerataan yang cepat.

PERBANDINGAN ANGKA KEMATIAN BAYI, PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA,
GINI RATIO, HARAPAN HIDUP, KEPADATAN, PROSENTASE PENDUDUK 10 + YANG DAPAT BACA/
TULIS DAN RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH PROPINSI DI INDONESIA 1980

No.	Propinsi	Angka Kematian Bayi (1980)	Produk Domestik Bruto Per Kapita (ribuan) (1980)	Gini Ratio (1979)	Harapan Hidup		Kepadatan Penduduk Per Km ² (1980)	Persentase Penduduk 10 + Dapat Membaca dan Menulis	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 1976-1980
					Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
>120 (tinggi)									
1.	Nusa Tenggara Barat	187	108	0,298	38,00	40,70	135	53,79	7,13
2.	Jawa Barat	129	208	0,280	46,90	49,70	593	72,75	8,48
3.	Sulawesi Tengah	128	168	0,341	47,10	50,00	18	81,29	9,97
4.	Maluku	124	209	0,375	47,80	50,70	19	82,12	8,89
5.	Nusa Tenggara Timur	124	111	0,361	47,80	50,70	57	64,19	11,69
6.	Kalimantan Selatan	121	218	0,261	48,30	51,30	55	74,01	14,00
7.	Sumatera Barat	121	180	0,243	48,30	51,30	68	81,06	8,98
90 - 120 (sedang)									
8.	Sumatera Selatan	118	333	0,284	52,80	56,00	45	80,13	11,04
9.	Jambi	118	-	0,272	48,80	51,70	32	74,41	7,52
10.	Kalimantan Barat	116	214	0,299	49,20	52,20	17	55,73	9,38
11.	Sulawesi Tenggara	114	169	0,302	49,75	52,20	34	67,10	10,38
12.	Riau	113	232	0,338	49,90	53,00	23	75,93	7,11
13.	Sulawesi Selatan	108	195	0,340	50,90	54,00	83	59,91	10,00
14.	Irian Jaya	106	209	-	50,90	54,00	19	82,12	11,68
15.	Bengkulu	106	169	0,299	51,10	54,20	36	73,18	21,39
16.	Kalimantan Tengah	100	313	0,257	50,00	55,50	6	77,27	14,09
17.	Jawa Timur	99	187	0,308	52,30	55,50	609	61,50	8,12
18.	Kalimantan Timur	99	846	0,203	52,30	55,50	6	74,01	14,79
19.	Lampung	97	188	0,299	52,80	56,00	139	76,28	7,87
20.	Sulawesi Utara	94	257	0,372	53,20	56,00	111	90,48	14,07
21.	Jawa Tengah	96	150	0,290	52,80	56,00	742	65,27	8,19
22.	D.I. Aceh	91	691	0,263	54,20	57,50	47	72,51	31,42
<90 (rendah)									
23.	Sumatera Utara	89	309	0,257	54,40	57,70	118	83,69	9,37
24.	Bali	88	198	0,298	54,40	57,70	444	61,27	12,78
25.	DKI Jakarta	80	580	0,370	56,00	59,50	11.023	87,55	9,99
26.	DI Yogyakarta	62	141	0,338	58,90	63,50	868	68,46	6,13

Catatan: Dihitung tanpa minyak bumi untuk kolom (4).

Sumber: Soemarsono (1983), untuk kolom (3).

BPS untuk kolom - (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10), diolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Biro Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 1980-2000*, Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia*, Hasil Sensus Penduduk 1980 Seri S.2., Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia 1976-1980*, Jakarta, 1983.
- Chenery, Hollis B., "Poverty and Progress Choices for Developing World," dalam *Finance and Development*, June, 1980, hal. 12-16.
- Esmara Hendra, "Regional Income Disparities," dalam *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 9 (1), ANU, Canberra, 1973.
- Grant, James A., "Disparity Reduction Rate in Social Indicators, A Proposal for Measuring and Targeting Progress in Basic Needs," dalam *Overseas Development Review*, No. 1, 1978.
- Hick, Norman L., "Growth Vs. Basic Needs: Is There A Trade Off?," dalam *World Development*, Vol. 7 (November/December 1979) hal. 985-994.
- Isard, Walter, *Methods of Regional Analysis*, The MIT Press, 1969.
- "Diskusi Panel Ahli Kompas," *Kompas*, 9 dan 10 Desember 1983.
- Leipziger, Danny M., dan Lewis M.A., "Social Indicators, Growth and Distributions," dalam *World Development*, Vol. 8, 1980, Pergamon Press, London, Great Britain, hal. 299-302.
- Lemhannas dan Dirjen Perti, *Kewiraan untuk Mahasiswa*, PT Gramedia Jakarta, 1982.
- Oshima, Harry T., "Perspective in Income Distribution Research," paper dalam *Seminar On Income Distribution, Employment and Economic Development on South East Asia*, Council for Asian Manpower Studies, Japan Economics Research Centre, Tokyo, Vol. 1, 1975.
- Poli, Sam F., "Employment and Income Distribution in Eleven Cities in Indonesia," tidak diterbitkan, M.A. Thesis, University of the Philippines, 1977.
- Kuznets, Simon, "Economic Growth and Income Inequality" dalam *American Economic Review*, Vol. 45, March 1955, hal. 1-28.
- Syahrudin dan Syafrudin Karimi, *Pemerataan Tanah di Indonesia, Sebuah Pembahasan Antar Daerah*, dalam Proyek Studi Sektoral Departemen P & K, Ditjen Perti, Juni 1980.
- Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*; terjemahan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Weaver, James H., "Growth and Equity: Can They Be Happy Together?" dalam *International Development Review*, No. 1, 1978, hal. 20-23.



BUKU-BUKU TERBITAN CSIS

Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti,
lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum.

SEKAR SEMERBAK:

Kenangan untuk Ali MOERTOPO

ix + 341 hal., @ Rp 5.000,00



Buku ini merupakan peringatan satu tahun wafatnya Ali Moertopo. Isinya meliputi berbagai hal yang diperkirakan menjadi minat almarhum semasa hidupnya, yang ditulis oleh Toeti Adhitama, F.R. Dalrymple, Derek Davies, Sukamdani S. Gitosardjono, Michael Leifer, Alejandro Melchor Jr., Goenawan Mohamad, David Newsom, A.R. Ramly, Robert A. Scalapino, Sabarn Siagian, A.R. Soehoed, Soemitro, Soerjadi, Juwono Sudarsono, G. Sugi-harto, H.N. Sumual, Sayidiman Suryohadiprojo, Abdurrahman Suryomihardjo, George K. Tanham, Abdul Gafur, Harry Tjan Silalahi.

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG PANCASILA

A. M. W. PRANARKA, xi + 509 hal., @ Rp 7.500,00



Disertasi ini diterbitkan karena mempunyai relevansi di bidang epistemologi dan ideologi. Perkembangan pemikiran mengenai Pancasila dewasa ini akhirnya memerlukan adanya penataan epistemologis, sehingga perkembangan pemikiran mengenai Pancasila melalui berbagai jalur dan berbagai pendekatan itu akan terjadi dalam suasana "rukun-patut-laras" tanpa terjerumus ke dalam subjektivisme, dogmatisme atau eklektisisme. Buku ini juga memberikan dokumentasi yang lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila dan akan sangat berguna bagi usaha-usaha pendalaman selanjutnya.

Masih Tersedia:

- PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA, Cet. ke-7, 1984, xviii + 95 hal., edisi HVS @ Rp 1.200,00, edisi biasa @ Rp 600,00
- PANCASILA ARTI DAN PELAKSANAANNYA, Kirdi DIPOYUDO, Cet. ke-2, x + 124 hal., @ Rp 1.750,00
- STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, Ali MOERTOPO, Cet. ke-2, 1982, xxii + 296 hal., @ Rp 4.000,00
- STRATEGI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: INDONESIA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK, Penyunting: Hadi SOEASTRO dan A.R. SUTOPO, 1981, xiv + 640 hal., @ Rp 7.000,00
- PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM BISNIS INTERNASIONAL, J. PANGLAYKIM, 1983, xii + 348 hal., @ Rp 3.500,00
- GOLKAR: FUNCTIONAL GROUP POLITICS IN INDONESIA, Julian M. BOILEAU, 1983, viii + 140 hal., @ Rp 2.250,00
- AFRIKA DALAM PERGOLAKAN-2, Kirdi DIPOYUDO, 1983, xiv + 208 hal., @ Rp 2.750,00
- ENERGI DAN PEMERATAAN, Hadi SOEASTRO et al., 1983, viii + 239 hal., @ Rp 3.500,00
- PACIFIC ECONOMIC COOPERATION: THE NEXT PHASE, editor: Hadi SOEASTRO dan HAN Sung-joo, 1983, xiv + 302 hal., @ Rp 3.750,00
- PEACE AND SECURITY IN THE ATLANTIC AND PACIFIC REGIONS, 1983, x + 293 hal., @ Rp 3.750,00
- ISSUES FOR PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, 1983, vi + 142 hal., @ Rp 4.250,00
- REGIONAL DIMENSIONS OF INDONESIA-AUSTRALIA RELATIONS, 1984, viii + 124 hal., @ Rp 2.000,00
- INTERNAL DEVELOPMENTS IN JAPAN AND INDONESIA, 1985, x + 90 hal., @ Rp 1.500,00

TERBITAN BERKALA:

ANALISA:

Terbit setiap bulan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, @ Rp 750,00. Langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,00 sudah termasuk ongkos kirim, untuk mahasiswa Rp 6.750,00/tahun. Masih tersedia nomor-nomor lepas dari yang sudah terbit.

- MELAKSANAKAN PANCASILA
- KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- PERSEKUTIF PELITA IV
- MASALAH KAMPUCHEA DAN HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM
- PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- MEMBANGUN DEMOKRASI
- PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- MEMBANGUN PEDESAAN

SERI DOKUMENTASI:

Kumpulan clipping berbagai surat kabar dan bulletin, dengan berbagai subjek dan masalah baik dalam negeri maupun internasional. Nomor-nomor terbaru antara lain:

- PRA-INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (67/P/XI/1983), xv + 225 hal., Rp 9.000,00
- INTEGRASI TIMOR TIMUR 1976 (I), (68/P/XI/1983), xi + 156 hal., Rp 6.500,00
- INTEGRASI TIMOR TIMUR 1976 (II), (69/P/XI/1983), ix + 111 hal., Rp 5.000,00
- MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian I), (70/P/III/1984), v + 105 hal., Rp 4.750,00
- MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian II), (71/P/III/1984), xiv + 158 hal., Rp 6.500,00
- DIPLOMASI TENTANG TIMOR TIMUR (72/P/III/1984), ix + 146 hal., Rp 5.750,00
- PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR 1977-1982 (73/P/III/1984), v + 115 hal., Rp 5.000,00
- PAKET 1 JUNI 1983 (74/E/IV/1984), x + 199 hal., Rp 8.000,00
- KOMINOK 1, JAKARTA 1984 (75/P/V/1984), xiii + 178 hal., Rp 7.500,00
- HUBUNGAN RI-UNI SOVIET 5 TAHUN TERAKHIR (1980-1984), (76/HI/VIII/1984), xiv + 208 hal., Rp 8.500,00
- GERAKAN WAJIB BELAJAR (77/PD/IX/1984), ix + 159 hal., Rp 6.500,00
- ASAS TUNGGAL (78/P/II/1985), viii + 166 hal., Rp 7.000,00
- MONOPOLI DAN OLIGOPOLI (79/E/III/1985), ii + 58 hal., Rp 3.000,00
- UNIVERSITAS TERBUKA (80/PD/III/1985), vii + 168 hal., Rp 6.750,00
- ORDE BARU (81/P/IV/1985), viii + 203 hal., Rp 8.250,00
- KONFLIK KAMBOJA (IV), (82/HI/V/1985), ix + 186 hal., Rp 8.000,00
- KONFLIK KAMBOJA (V), (83/HI/V/1985), xvii + 287 hal., Rp 11.000,00
- PEMULU AMERIKA SERIKAT 1984 (84/HI/V/1985), xiii + 232 hal., Rp 9.000,00
- INPRES NO. 4, 1985 (85/E/VI/1985), xv + 247 hal., Rp 10.000,00
- PERINGATAN 30 TAHUN KAA (86/P/VII/1985), xiv + 290 hal., Rp 11.000,00
- RI-RRC (87/E/VII/1985), xiii + 194 hal., Rp 8.250,00
- PEMBAJAKAN UDARA (88/HI/VIII/1985), xi + 149 hal., Rp 6.250,00
- TIMOR TIMUR 1983 (89/P/VII/1985), xiii + 179 hal., Rp 7.500,00
- PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-1), (90/P/VIII/1985), vii + 120 hal., Rp 5.250,00
- PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-2), (91/P/VIII/1985), viii + 124 hal., Rp 5.250,00
- PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-3), (92/P/VIII/1985), x + 207 hal., Rp 8.500,00



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDONESIA QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,— langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,— untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/buletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langganan pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

